

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Program Keluarga Harapan diluncurkan dan dilaksanakan pada tahun 2007 dan dijadikan sebagai program nasional oleh pemerintah. Oleh karena telah dijadikan program nasional, maka Program Keluarga Harapan telah dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satu daerah yang telah melaksanakan program tersebut adalah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tahun 2008. Tahun 2016 jumlah peserta PKH di Kabupaten Bantul mencapai 61.877 orang dengan pendamping sebanyak 114 orang. Dalam penelitian ini membahas pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta prinsip-prinsip yang digunakan dalam proses monitoring tersebut. Adapun hasil dari prinsip-prinsip yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan

Standar pelayanan yang telah diberikan oleh pendamping sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelayanan yang pada umumnya dilakukan oleh Pendamping PKH di antara lain mengadakan sosialisasi/pertemuan rutin dengan peserta KPM PKH, membantu

pengarahan kepada anak sekolah peserta PKH, membantu peserta PKH dalam pengambilan dana.

2. Akses untuk semua Masyarakat

Akses penting disini adalah peran seorang pendamping, meskipun akses secara online pun dapat di akses dengan mudah, akan tetapi akses melalui pendamping lah yang lebih dibutuhkan oleh peserta PKH yang dimana pendamping merupakan pihak yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat.

3. Kesopanan

Kesopanan menjadi poin penting bagi pendamping, karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat yang mayoritas memiliki pendidikan yang minim dan memiliki tingkat sentimentil yang cukup tinggi. Tingkat kesopanan yang telah diterapkan oleh pendamping sudah cukup baik dan dapat diterima oleh peserta penerima bantuan.

4. Informasi

Banyaknya dari peserta PKH yang memiliki pendidikan minim dan mengalami kesulitan dalam mencari informasi melalui website/internet, maka pendampinglah yang berperan penting dalam memberikan informasi-informasi terkait PKH. Informasi tersebut disampaikan bertepatan dengan perkumpulan dengan peserta PKH dan pendamping yang rutin dilakukan.

5. Terbuka dan transparan

Sistem koordinasi dan pencairan dana bantuan dilakukan secara transparansi dari pihak dinas kepada pendamping dan pendamping kepada masyarakat di setiap wilayah. Hal tersebut untuk mempermudah dalam melaksanakan koordinasi

A. SARAN

Saran yang diberikan oleh penulis bertujuan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan untuk kedepannya. Saran tersebut ditujukan untuk:

1. Peserta PKH

Penulis memberikan saran kepada KPM untuk lebih bijak dalam penggunaan bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah, untuk lebih mendorong anak-anaknya dalam bersekolah, karena salah satu faktor mogok nya anak-anak mogok sekolah adalah keluarga.

2. Pendamping PKH

Penulis memberikan masukan kepada Pendamping PKH untuk lebih meningkatkan kualitas bahan pembahasan yang dirasa sangat penting untuk menunjang kegiatan pertemuan kelompok dengan peserta PKH.

3. Pemerintah Daerah

1. Keberadaan pendamping perlu dilakukan penambahan jumlah mengingat kondisi yang ada sekarang tidak ideal, meskipun tidak ada

permasalahan yang berarti, akan tetapi jika jumlah semakin mendekati ideal, maka diharapkan akan mampu membuat kinerja pendamping lebih maksimal dan dapat dengan intens mendampingi para peserta.

2. Keberadaan website Dinas Sosial PPPA Kabupaten Bantul perlu dilakukan perbaikan dan pemutahiran data, mengingat data yang ada jarang diperbarui dan dipenuhi dengan data-data lama dan cenderung kurang *up to date*.
3. Transparansi penggunaan dana PKH perlu dipublikasikan di dalam website agar masyarakat dapat mengetahui rincian dari anggaran yang telah diturunkan oleh Pemerintah Pusat.

